

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No.1 Telp (0751) 7051700 Fax (0751) 7051783 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> - email : [pdeisb@sumbarprov.go.id](mailto:pdeisb@sumbarprov.go.id)



DOKUMEN PENGADAAN

**SURAT PESANAN  
(Kontrak e-Katalog)**

**PEKERJAAN :**  
**PAKET BELANJA MODAL**  
**ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI**

**PENYEDIA JASA:**  
**PT. KHANSA NIAGA PRATAMA**  
*Jl. Melong Asih Komp Melong Nirwana Residence No. A-5 RT 007 RW 009  
Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung*

**SUB KEGIATAN :**  
**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN PROVINSI**

**KEGIATAN :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**PROGRAM :**  
**PENYELENGGARAAN JALAN**

**SUB UNIT :**  
**UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



## DAFTAR ISI

1. Surat Pesanan (Kontrak e-Katalog)
2. Spesifikasi Teknis
3. Proses Pengadaan e-Katalog
4. Dokumen Kualifikasi Perusahaan

**SURAT PESANAN**  
**(Kontrak e-Katalog)**



**SURAT PESANAN**

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN                      KERJA                      PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN                      TANDA BUKTI PERJANJIAN : PAKET BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 07/Kontrak- eKatalog/UPTD-LBK/III/2024 , Tanggal 18 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Susy Anas

PPK

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang & - Kota Padang - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

JL. MELONG ASIH KOMP MELONG NIRWANA RESIDENCE NO.A-5 RT.007 RW.009 KEL.CIJERAH  
KEC.BANDUNG KULON

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

Rincian Barang

**Daftar Produk PAKET AL2-P2403-8827077**



<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
4826201999-AL2-190508204 <b>LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY</b>	1.0	IDR	Rp 378.000.000,00	Rp 0,00	19 Maret 2024	Rp 378.000.000,00
4826201999-AL2-190846701 <b>BIKONUS</b>	2.0	IDR	Rp 4.450.000,00	Rp 0,00	19 Maret 2024	Rp 8.900.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

**1. Hak dan Kewajiban**

**a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

**1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:**

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.



- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
    - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

## 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 5 Juli 2024

## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
  - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.



- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.

#### 6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.



- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

#### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2. pembayaran dilakukan dengan .....; dan
  - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah PPK menilai



bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 14. Sanksi

##### a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

##### b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
  - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
  - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

##### c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

##### a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

##### b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
  - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
  - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

##### c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:



- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak



langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

## 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

### 1. Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



Susy Anas

PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)



PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

JL. MELONG ASIH KOMP MELONG NIRWANA  
RESIDENCE NO.A-5 RT.007 RW.009 KEL.CIJERAH  
KEC.BANDUNG KULON



### SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke : _____ [diisi dengan kas negara atau kas daerah]
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut:  Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Susy Anas, ST, MT Alamat: Jl. Taman Siswa No. 1 PadangTelepon : (0751) 7051700 Website : <a href="http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id">http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id</a> Faksimili: (0751) 7051783 e-mail : <a href="mailto:pdeisb@sumbarprov.go.id">pdeisb@sumbarprov.go.id</a>  Penyedia : Nama : <u>PT. Khansa Niaga Pratama</u> Alamat : Jl. Melong Asih Komp. Melong Nirwana Residence No. A-5 RT 007 RW 009 Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung Telepon : <u>022-86067632</u> Website : _____ Faksimili: _____ e-mail : <a href="mailto:khanita_pt@yahoo.com">khanita_pt@yahoo.com</a>
7. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Susy Anas, ST, MT  Untuk Penyedia: Rizkie Ramadhan Setiawan  Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada)
9. Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: 1. _____ 2. _____ 3. _____dst [diisi pada saat finalisasi Kontrak, sesuai dengan penawaran Penyedia]



- 9.6 Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi \_\_\_\_\_  
[diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan:  
a. dilakukan pemutusan kontrak; atau  
b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.]
- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** 12.2 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- 15. Inspeksi Pabrikasi** 17.1 Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan: Tidak  
17.2 Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada:  
Hari \_\_\_\_\_  
Tanggal \_\_\_\_\_  
Ruang Lingkup : \_\_\_\_\_
- 16. Pengepakan** 18.1 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat  
[diisi dengan Tujuan Pengiriman atau Tujuan Akhir]  
18.2 Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut:  
Aman terhadap benturan (barang mudah pecah/riskan)
- 19. Pengiriman** 19.1 Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Sertifikat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), Sertifikat Produksi, Sertifikat Garansi Minimal 1 (satu) Tahun dan Manifest Perjalanan Pengiriman.  
  
Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.



- 19.2 Penyedia menggunakan transportasi Kapal Laut dan Mobil untuk pengiriman barang melalui Laut dan Darat.
- 20. Asuransi**
- 20.1 Pertanggungans asuransi terhadap barang meliputi : Barang dapat berfungsi dengan baik
- 20.2 Pertanggungans asuransi terhadap pengiriman meliputi : Packing dan Barang sampai tujuan dalam keadaan baik
- 20.3 Penerima manfaat : UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
- 21. Transportasi**
- 21.1 Tempat Tujuan Pengiriman: Kota Padang
- 21.2 Tempat Tujuan Akhir: UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- 23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 23.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Penyedia Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
- 23.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Pelatihan 2 (dua) dari, kalibrasi alat, dokumen pendukung (manual book dan cara perawatan), surat dukungan produsen atau distributor.
- 23.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- 26. Peristiwa Kompensasi**
- Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila \_\_\_\_\_
- 27. Perpanjangan Waktu**
- 27,5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat \_\_\_\_\_  
[diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 28. Pemberian Kesempatan**
- 28.3 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 5 Juli 2024  
[diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya



jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

- 29. Serah Terima Barang** 29.2 Serah terima dilakukan pada: UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
- 36. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak** 36.1.j Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama \_\_\_\_\_  
[diisi dengan jumlah hari kalender]
- 37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** 37.1.a Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama \_\_\_\_\_  
[diisi dengan jumlah hari kalender]
- 37.1.b Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama \_\_\_\_\_  
[diisi dengan jumlah hari kalender]
- 39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak** 39.2.e Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Tidak Ada
- 44. Penanggungan dan Risiko** 44.4 \_\_\_\_\_ hari kalender.  
[diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada]
- 47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga** 47.1 Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak
- Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Tidak
- 48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak** 48.b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain:  
\_\_\_\_\_



**49. Kerjasama  
Penyedia  
dengan usaha  
kecil Sebagai  
SubPenyedia**

49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ dst

*[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]*

**55. Kepemilikan  
Dokumen**

55.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: atas izin Pejabat Penandatanganan Kontrak

**58. Pembayaran**

58.1.a Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka: Tidak.

58.1.b *[jika "YA"]*  
Uang muka diberikan sebesar % ( \_\_\_\_\_ persen) dari Nilai Kontrak.

58.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.

58.3.a Ganti rugi  
Besarnya ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan:

*[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]*

58.3.b Denda Keterlambatan  
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_



4.

dst

*[diisi dengan bagian pekerjaan]*

**67. Penyelesaian  
Perselisihan**

67.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Padang.



**SPESIFIKASI TEKNIS**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700-7051756-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id> - email: [pdeisb@sumbar.go.id](mailto:pdeisb@sumbar.go.id)

## SPESIFIKASI TEKNIS PAKET BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024

UNIT ORGANISASI : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat  
SUB UNIT : UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi  
PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan  
KEGIATAN : Penyelenggaraan Jalan Provinsi  
SUB KEGIATAN : Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

### 1. LATAR BELAKANG

#### a. Dasar Hukum

1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 87 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang baru yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 104 tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. DPA SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

#### b. Gambaran Umum

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi merupakan unit dari Organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi yang pendanaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).



UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi melayani pengujian yang terdiri dari Seksi Pengujian Mutu Bahan dan Seksi Pengujian Mutu Konstruksi yang bergerak dalam bidang Agregat, Tanah, Aspal, Beton, Pengujian Konstruksi dan Geoteknik.

Pengadaan Alat Marshall Stability Test Universal Multispeed dan Biconus Sondir ini melalui Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi berkaitan dengan alat pengujian stabilitas dan kelelahan benda uji campuran panas aspal-agregat untuk lapis perkerasan aspal AC-WC, AC-BC dan AC-Base serta berkaitan dengan mata konus pembacaan alat pengujian Sondir. Dimana peralatan yang ada sebelumnya sudah sering rusak dan termakan usia, sehingga perlu peremajaan sesuai dengan standar pengujian yang berlaku.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi ini adalah berupa pengadaan alat pengujian Marshall terhadap Stabilitas dan Kelelahan Benda Uji Perkerasan Aspal AC-WC dan AC-BC yang dikontrol secara digital, dapat untuk cetakan mould 4 inchi yang keadaannya baru dan juga pembelian mata biconus Alat Sondir yang baru

Tujuan pengadaan Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi ini adalah:

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pengujian campuran aspal yang berstandar.
- b. Menghasilkan data-data pengujian yang valid dan memenuhi standar-standar berikut: SNI 2489:1991 tentang Metode Pengujian Campuran Aspal dengan Alat Marshall; ASTM D 6926-04 toward Standard Practice for Preparation of Bituminuos Specimens Using Marshall Apparatus; ASTM D 5581-96 toward Standard Test Metode for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus (6 inchi diameter specimen); AASHTO T245-97 toward Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus.
- c. Mempercepat pelayanan pengujian dalam memenuhi permintaan pelanggan karena peralatan yang sifatnya mekanis digital sehingga keakuratan dan kecepatan pengujian lebih baik.

## **3. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah melaksanakan Proses Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi sesuai yang diharapkan dan kondisinya baru.

7



#### 4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari Pengadaan alat ini adalah:

- a. Meningkatkan profesionalitas dan kemampuan UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada peminta jasa secara baik.
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pengujian yang memenuhi standarisasi sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai Laboratorium Pengujian.
- c. Meningkatkan daya saing UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terhadap jasa pengujian stabilitas dan kelelahan terhadap campuran aspal-agregat.

#### 5. URAIAN KEGIATAN

Penyusunan spesifikasi teknis ini bertujuan sebagai pedoman dalam proses Pengadaan Alat Stabilitas Marshall dan Biconus Sondir dan dijadikan acuan oleh Tim Pengadaan untuk mengevaluasi penawaran yang diajukan rekanan dari segi teknis pengadaan.

Adapun proses pengadaan Paket Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Kelengkapan Data-data Dokumen Pengadaan dilaksanakan oleh KPA dan PPTK.
- b. Proses e-Purchasing melalui e-Katalog.
- c. Pembelian atau negosiasi harga dengan penyedia barang di e-Katalog.
- d. Proses Pengiriman Barang
- e. Proses Penerimaan Alat harus dilengkapi dengan Bukti manifest pengiriman perjalanan asal mula (khusus produk import). Sertifikat keaslian produk, Berita Acara Pemeriksaan Fungsi Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari pihak penyedia kepada pengguna jasa.

#### 6. LOKASI

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Jalan Taman Siswa No. 1 Padang



7. SPESIFIKASI TEKNIK

Spesifikasi Barang

Uraian	Jumlah	Ukuran/Spesifikasi
<p><b>Marshall Stability Test Universal Multispeed</b></p>	<p>1 Unit</p>	<p>LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY STANDARDS: EN 12697-34, 12697-23, 12697-12 ASTM D6927, D5581, D1559   AASHTO T245 BS 598:107   NF P98-251-2</p> <p>Measures and displays at the same time the stability in kN and the flow in mm with peak hold features, with the possibility to transfer them to a PC and a printer through a RS232 port. Supplied complete with Stability mould. Power supply: 230V 1ph 50Hz 900W Dimensions: 650x400x1100 mm Weight: 120 kg approx. ACCESSORIES SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2) Licence for MARSHALL test Standards: EN 12697-34   ASTM D6927, D5581, D1559 BS 598:107   NF P98-251-2 Data processing program for "X-Y STABILITY/FLOW" General description and technical details: see UTM2 UTM2 SOFTWARE</p> <p>Software developed by Matest allowing operators the management and a "User friendly" control of Matest's digital testing machines. Software available in different languages (Italian, English, French, Spanish, German, Polish, Czech, Slovak, Turkish). The optimal solution of laboratories for its characteristics of versatility with a wide range of customizations, for testing and research. The ideal Software for the management of an extensive production. It contains preset profile tests according to the specifications of the EN Standards and the most common International Standards. Flexibility, operating speed, precision and automatic storage are the fundamental characteristics of the Software conceived to facilitate the operator with few computer skills, for the management of the tests and the testing machines too. By connecting the PC to the testing machine it is possible to perform the most complex tests just by pressing the start button. UTM2 requires a low expertise operators without any specific experience to use the software</p>



	<p>successfully (with low cost for the company). It facilitates the printing of certificates suggesting a preset layout but changeable and customizable by the user with its own logo or others. The software is developed on Windows platform and can be installed on old and new operative systems, from Windows XP onwards</p> <p><b>General features of the UTM2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatic identification of the appliance connected.</li> <li>Easy setting of the sequence of operations concerning the test to be made settable by the operator.</li> <li>The realization of a personalized testing profile savable and reusable allowing to operate following his own needs setting data and cycle test, the analogical measuring channels and the speed charts.</li> <li>Memorization of the test in the database with the possibility to process it again.</li> <li>Remote and interactive control of the machine.</li> <li>Visualization of the instant loads, instant definition of the load/ deformation/stroke graph, remote control of the main functions of the machine.</li> <li>It can also visualize the emergencies, the alarms and the eventual errors, it calculates and saves all the parameters of the test made with the possibility to process again, and to manage the test files.</li> <li>The data test can be commented by means of test titles to be reported on the certificate or on the graph desired.</li> <li>The user can select the calculation algorithms and , using them, the SOFTWARE will process all the results required by the Standards.</li> <li>The colors and the graph scales of the activated windows can be freely selected by the user as well as zooming on the main interested graphic points.</li> <li>The test certificate can be personalized with the following variables: name of the company, kind of test, date, kind of graph and number of pages.</li> <li>Possibility to visualize into one graph and register into the archive up to no. 5 test contemporaneously, in order to dispose of a complete and global information about the tests performed for the same production batch</li> <li>Technical specifications <b>HARDWARE</b> - Processor: 312 MHz upgradable till 806 MHz - Display-LCD, QVGA (320x240 pixels) Full-color Touch-screen - Cross Keyboard. It can</li> </ul>
--	--



	<p>completely replace the touch-screen function (for an easy use with gloves, for example) Hardware - Connectivity - 1 x SD card - 2 x USB hosts available for: mouse, keyboard, pen-drive, printer, USB Hub (to expand the number of ports), other peripherals from PC Hardware - I/O - 8 Channel ADC Converter (with 2 high resolution channels for use with load cells); Sampling frequency: up to 200 Hz (for all the 8 channels) Number of bits: up to 24 - 8 digital inputs - 8 digital outputs Motor Ignition, Valves activation - Expansion Connector Hardware - Control operation - 2 x stepper motor controllers 1 x standard controller, 1 x optional controller - Brushless or stepper motor, through Expansion board Hardware - Storage - Internal flash memory, dedicated to the software and to the configuration of profiles, machine, channels (including calibrations), etc - Unlimited memory using external memory devices SD -Card, Pen-Drive Hardware - Various - On board thermic graphic printer (Accessory: C127N) - Clock Calendar, buzzer alarm Software - Operating system: "Windows Embedded CE 6.0 R3" - User-friendly interface - Easy updating of software and operating system - International setting configuration Multilanguage Interface Date/time/numbers formatting system Measurement systems (S.I.; US System) - Software modularity Reference standards and tests compiled through easy to install software modules - Power calculation Superior calculation capacity Graphic representation of the test data Independent use from the PC Software - Languages - Italian, English, French, German, Spanish, Russian, Polish, Greek, Portuguese, Dutch, Romanian, Czech. Additional languages on request Software - Licenses - Every machine has an unique specific serial number - Compliance to specific standards through dedicated license files Software - Record and report - Test records: Data, Results, Chart - Printing: Through on board printer (Accessory C127N) Though PCL printer connected to USB Software - "Maintenance" - Available updates: Operating System, Applications, Licenses</p>
--	---



		(backup and restore), Configuration (backup and restore), Software log - New "UTM"; machine control through Ethernet (Intranet, Internet) - Internet connection for remote assistance <b>INCLUDES:</b> Standard wood packing charges. Freight charge to client site. Installation and running charges. Training for using this apparatus by instructor with giving certificates.
<b>Biconus Sondir</b>	1 Unit	Ring f-150 cap 2,5 t

**8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak Surat Pesanan disetujui.

**9. PELATIHAN DAN PEMBAYARAN**

Penyedia jasa diharuskan mengadakan instalasi dan pelatihan terhadap peralatan baru tersebut di laboratorium tujuan, dan pembayarannya diproses sekaligus setelah barang diserahkan.

**10. KELUARAN**

Terlaksananya Pengadaan Paket Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi, sesuai jenis dan spesifikasi yang dibutuhkan.


**11. ANGGARAN**

Kegiatan ini dibiayai dari DPA SKPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Sub Unit UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi sumber dana PAD Tahun Anggaran 2024.

Padang, Februari 2024



Kuasa Pengguna Anggaran

  
**Susy Anas, ST-MT**

NIP. 19750607 200801 2 003



**PROSES PENGADAAN E-KATALOG**



Find The Business Actor → Business Actor's Profile

### PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

✓ VERIFIED

Taxation Identification Number 70.824.293.8.422.000  
JL. MELONG ASIH KOMP MELONG NIRWAN RESIDENCE NO A-5 RT 007 RW 009 KEL. CIJERAH KEC. BANDUNG KULON - Bandung (Kota)  
Jawa Barat - 40213

Form of Business PT	EMAIL khanita_pt@yahoo.com	PHONE 022 - 86067632	STATUS PERUSAHAAN Kantor Cabang
WEBSITE	JOB TYPE Barang	QUALIFICATION Kecil #F	CLASSIFICATION OF BUSINESS SECTORS KBLI

Classification Detail

← BACK



#### Head Office

##### Head Office

ADDRESS	PHONE	FAX
EMAIL		

#### Contact Person

NAME Rizkie Ramadhan	ADDRESS JL. MELONG ASIH KOMP MELO	PHONE	EMAIL khanita_pt@yahoo.com
-------------------------	--------------------------------------	-------	-------------------------------

#### Business License

0163/KIP-UB/X/201...	AGENCY BADAN PELAYANAN PE...	CLASSIFICATION KBLI	DATA SOURCE LKPP	✓ VERIFIED
EXPIRED DATE Lifetime	QUALIFICATION Kecil	AUDIT UPDATE 28 Mar 2015	Classification Detail	← → More...

#### Experience

Pengadaan Alat La...	AGENCY USER Kementerian Pekarj...	CLASSIFICATION KBLI	CONTRACT VALUE Rp 152.01	✓ VERIFIED
THE DATE OF CONTRACT Nov 2018 - Dec 2018	JOB IMPLEMENTATION PERCENTAGE 100 %	AUDIT UPDATE 05 Nov 2020	Classification Detail	← → More...

#### Deed of Establishment

DEED NUMBER 193	DATE 21 Jun 2014	NOTARY Nuzhayati Sampurna, S.H	AUDIT UPDATE 28 Mar 2019
--------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------

#### Deed of Changes

NOMOR AKTA 09	DATE 17 Feb 2020	NOTARY Lina Agustriawati, S.H, M.Hum, M.Kn	AUDIT UPDATE 04 Mar 2020
------------------	---------------------	---	-----------------------------



Penyedia	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA
Username	khanita
Status Penyedia	Aktif
Alamat	JL. MELONG ASIH KOMP MELONG NIRWANA RESIDENCE NO.A-5 RT.007 RW.009 KEL.CIJERAH KEC.BANDUNG KULON
Kode Pos	40213
Email	khanita_pt@yahoo.com
Situs Web	
No. Telp	022 - 86067632
No. Fax	022 - 86067632







Informasi Penyedia Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang Rating Penyedia KBLI Data SikAP

Kategori ID Nama Kategori

G46691

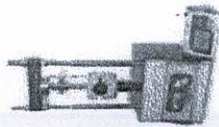
PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA





### Keranjang Belanja

PT. KHANSA NIAGA PRATAMA - Alat Laboratorium - IDR



LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY

1

Kuantitas

Harga Satuan

Rp.399,250,000.00

Total Harga

Rp.399,250,000.00



BIKONULUS

2

Kuantitas

Harga Satuan

Rp4,850,000.00

Total Harga

Rp9,700,000.00

Hubungi Kami

Produk

Evaluasi Data

Total Keseluruhan Rp 408.950.000,00





Daftar Paket

Tampilkan BPKM

Nomor	Paket	Komoditas	Satuan Kerja	Instansi	Nama Penyedia	Tanggal Buat	Posisi	Jenis Paket	Negosiasi	Total Produk	Total Harga	Status	Lacak Status
1.	<b>AL2-P2403-0027077</b> Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024	ppk	Purchasing	Ya	2	Rp 408.950.000,00	Proses negosiasi	
2.		Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024		Purchasing	-		Rp 0,00	Draft	
3.	<b>AL2-P2403-0026930</b> Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	15 March 2024	ppk	Purchasing	Ya	2	Rp 410.250.000,00	Paket batal	
4.		Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	16 March 2024		Purchasing	-		Rp 0,00	Draft	
5.	<b>AL2-P2303-1246941</b> Pengadaan Alat Automatic MarshShall Compactor	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	06 March 2023	ppk	Purchasing	Ya	1	Rp 490.000.000,00	Paket selesai	

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 data







Halaman Produk

Beranda Pengumuman Profil • Data Master • Paket • Produk • Katalog • Produk • Konten • Komunitas • Berita • Monev • Unduh • Tanya Jawab • Pelanggan

Syarat dan Ketentuan • Hubungan Kami

Buat Paket - PT. KHANSA NIAGA PRATAMA



Dokumentasi Persiapan Purchasing



RUP RIUP



Informasi K/L/P/D



Data PPK/Pembeli



Daftar Produk

### Dokumentasi Persiapan Purchasing

#### Spesifikasi Teknis\*

Produk yang dipilih merupakan produk yang sesuai dengan spesifikasi dan ditetapkan oleh PPK.



#### Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri\*

Produk yang dipilih merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai dengan urutan prioritas dan ketentuan yang berlaku.



#### Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia Usaha Kecil serta Koperasi\*

Produk yang dipilih merupakan Produk dan Penyedia Usaha Kecil serta Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.



#### Pengumpulan Referensi Harga\*

PPK/PP sudah mengumpulkan Referensi Harga dan produk yang dipilih merupakan produk dengan referensi harga terbaik.



#### Unggah File Dokumen Persiapan\*

Persiapan Katalog Merchand Stability 2024.pdf

\*Format file yang diizinkan pdf, png, jpg, jpeg, zip, rar dan maks ukuran file 10MB

Choose file

Sebelumnya

Berikutnya





Pilih RUP

Nomor	RUP	Tahun Anggaran	Jenis Instansi	Instansi	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
48643105	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	2024	PROVINSI	Provinsi Sumatera Barat	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	387.584.450

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

Sebelumnya

Berikutnya







80 NUP: 20523105 Sumber Data: Kode Anggaran: 1.63.05.101.002.4.0.00.01.0004

Rencana: AKA Laboratorium

Nama Pelat: BANGUN MENDIRI SIAI LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONTROL

Tahun Anggaran: 2024

Jenis Instansi: PROKER

Instansi: Provinsi Sumatera Barat

Nama Satuan Kerja: DINAS BINA MANDU, CPTA KOTA DINKA PADANG

NPPW Satuan Kerja: 00.21.923.4.201.000

Alamat Satuan Kerja: Provinsi Sumatera Barat

Kelurahan/Desa: Kota Padang

Alamat Lengkap: Jl. Tercan 3, Jln. No. 1 Padang

Alamat Pengiriman:  Gunakan Alamat Satuan Kerja

Provinsi: Sumatera Barat

Kabupaten/Kota: Kota Padang

Alamat Lengkap: Jl. Tercan 3, Jln. No. 1 Padang

Statistiknya

Revisinya





Beranda | Pengiriman | Faktur | Produk | Kompetisi | Faktur | Data Paket | Profil | Log Out | Beranda | Laporan | Pengiriman | Pengiriman

**Informasi Paket**

DOKUMEN PAKET  
 DOKUMEN PAKET

**Informasi Paket**

Distributor/Reseller/Pedakasa Pekerjaan/Pengirim Barang

Sumber Data

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

**Informasi Paket**

Distributor/Reseller/Pedakasa Pekerjaan/Pengirim Barang

Sumber Data

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

Diskon

512025

Status

Mempunyai Paket

Batas waktu respon paket

21 Mar 2024 18:05:48

Posisi Paket

ppk

Total Produk

2

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima berdasarkan penyelesaian penerimaan produk

0

53403 NAG25049

Pemetaan

Penyedia

Nostrifikasi penyedia

PT KHASA NAGA TRIAMA

Harga Regulasi

Renti

Oleh

512025

Total Harga (IDR)

Rp 428.940.000,00









**Informasi Utama** | **Dokumentasi Persiapan** | **Pemesanan & PPK**  
**Penyedia dan Distributor/Retailer/Pelaksana Pekerjaan/Penyisipin Barang** | **Sumber Data** | **Diskusi**

**PPK/Pemilik**  
 Nama: Susy Anas (19750807)  
 Jabatan: PPK  
 NIP: 197508072006012003  
 Email: Susyanaspp714@gmail.com  
 No. Telp: 08125626785

**No. Sertifikat PBJ**  
 11101972579319

**PPK/Pemilik**  
 Nama: Susy Anas (19750807)  
 Jabatan: PPK  
 NIP: 197508072006012003  
 Email: Susyanaspp714@gmail.com  
 No. Telp: 08125626785

**No. Sertifikat PBJ**  
 11101972579319

**Harga Negosiasi**  
 Revisi: 0  
 Oleh: Susy Anas  
 Total Harga (IDR): Rp. 428.950.000,00

**Status**  
 Status: Menunggu Paket  
 Batas waktu respon paket: 21 Maret 2024 18:05:48  
 Posisi Paket: pks

**Total Produk**  
 2  
**Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima berdasarkan penyelesaian penerimaan produk**  
 0

**Status Negosiasi**  
 Pemesan:  
 Penyedia:  
 Notifikasi penyedia: PT KHANSA NUSLA PRATAMA







Semua produk yang dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan antara LKPP Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Katalog Elektronik

**Negosiasi Paket AL2-P2403-8827077**

**Etalase Produk**    Alat Laboratorium  
**No. Paket**    AL2-P2403-8827077  
**Nama Paket**    Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi  
**Pemesan Setuju**    Tidak Setuju  
**Penyedia Setuju**    Tidak Setuju

**Harga Kesepakatan**

**Perkiraan Ongkos Kirim**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Negosiasi	Harga Terbaik	Total Harga
4826201909-AL2-190506204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	399.250.000	399.250.000	399.250.000	399.250.000
4826201909-AL2-1905066781 BIMONUS	2	IDR	4.850.000	4.850.000	4.850.000	9.700.000

Menampilkan 1 sampai 0 dari 0 data

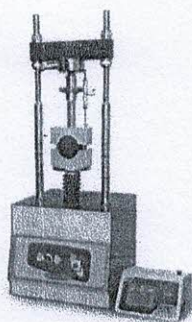








Beranda > Alat Uji > Kimia Frik Lerenya > LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY



### LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY

4826201909-AL2-190508204

PERHIMPUNAN INDIENI BAKRAFORDI

Rp 399.250.000,00

Stok Produk : 10

Ada masalah dengan produk ini? [Laporkan](#)



Spesifikasi Riwayat Harga Riwayat Produk Lampiran Referensi Ongkos Kirim Diskusi Produk Dokumen Pendukung Harga

#### Rating Penyedia

Nama Produk	LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY
Masa Berlaku Produk	2025-01-01
Merek	Tanpa Merek
Status Merek	
Nama Pemilik Merek	
No. Produk Penyedia	S215A - Asphalt Stability
Unit Pengukuran	set
Jenis Produk	import
Kode KBKI	02040201
Nilai TKDN(%)	Tidak Ada
No. SNI	Tidak Ada
Material	Steel
Ukuran/Dimensi	
SNI	

#### Keterangan Lainnya

LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY STANDARDS: EN 12697-34, 12697-23, 12697-12, ASTM D6927, D5581, D1559 | AASHTO T245 EN 598-107 | NF P98-251-2 Measures and displays at the same time the stability in kN and the flow in mm with peak hold features, with the possibility to transfer them to a PC and a printer through a RS232 port. Supplied complete with Stability mould. Power supply 230V 1ph 50Hz 900W Dimensions: 650x400x1100 mm Weight: 120 kg approx. ACCESSORIES SOFTWARE UTM2 (Universal Testing Machine 2) Licence for MARSHALL test Standards: EN 12697-34 | ASTM D6927, D5581, D1559 EN 598-107 | NF P98-251-2 Data processing program for "X-Y STABILITY/FLOW" General description and technical details: see UTM2 UTM2 SOFTWARE Software developed by Matest allowing operators the management and a "User friendly" control of Matest's digital testing machines. Software available in different languages (Italian, English, French, Spanish, German, Polish, Czech, Slovak, Turkish). The optimal solution of laboratories for its characteristics of versatility with a wide range of customizations, for testing and research. The ideal Software for the management of an extensive production. It contains preset profile tests according to the specifications of the EN Standards and the most common International Standards. Flexibility, operating speed, precision and automatic storage are the fundamental characteristics of the Software conceived to facilitate the operator with few computer skills, for the management of the tests and the testing machines too. By connecting the PC to the testing machine it is possible to perform the most complex tests just by pressing the start button. UTM2 requires a low expertise operators without any specific experience to use the software successfully (with low cost for the company). It facilitates the printing of certificates suggesting a precise layout, but changeable and customizable by the user with its own logo or others. The software is developed on Windows platform and can be installed on old and new operative systems, from Windows XP onwards General features of the UTM2 Automatic identification of the appliance connected. Easy setting of the sequence of operations concerning the test to be made, settable by the operator. The realization of a personalized testing profile, scalable and reusable allowing to operate following his own needs setting data and cycle test, the analogical measuring channels and the speed charts. Memorization of the test in the database with the possibility to process it again. Remote and interactive control of the machine. Visualization of the instant loads, instant definition of the load/deformation/stroke graph, remote control of the main functions of the machine. It can also visualize the emergencies, the alarms and the eventual errors, it calculates and saves all the parameters of the test made with the possibility to process again, and to manage the test files. The data test can be commented by means of test titles to be reported on the certificate or on the graph desired. The user can select the calculation algorithms and, using them, the SOFTWARE will process all the results required by the Standards. The colors and the graph scales of the activated windows can be freely selected by the user, as well as zooming on the main interested graphic points. The test certificate can be personalized with the following variables: name of the company, kind of test, date, kind of graph and number of pages. Possibility to visualize into one graph and register into the archive up to no. 3 test contemporaneously, in order to dispose of a complete and global information about the tests performed for the same production batch. Technical specifications HARDWARE - Processor: 312 MHz upgradable till 806 MHz - Display LCD, QVGA (320x240 pixels) Full color, touch-screen - Cross Keyboard - It can completely replace the touch screen function for an easy use with gloves, for example Hardware - Connectivity: 1 x SD card - 2 x USB hosts available for mouse, keyboard, pen-drive, printer, USB Hub (to expand the number of ports), other peripherals from PC Hardware - I/O - 8 Channel ADC Converter with 2 high resolution channels for use with load cells; Sampling frequency: up to 200 Hz (for all the 8 channels) Number of bits: up to 24 - 8 digital inputs - 8 digital outputs Motor ignition Valve activation - Expansion Controller Hardware - Control operations - 2 x stepper motor controllers - 1 x standard controller - 1 x optional controller - Brushless or stepper motor, through Expansion board Hardware - Storage - Internal flash memory, dedicated to the software and to the configuration of profiles, machine, channels (including calibrations), etc. Unlimited memory using external memory devices SD - Card, Pen Drive Hardware - Various On-board thermic graphic printer (Accessory C127N) - Clock Calendar, buzzer Alarm Software - Operating system: "Windows Embedded CE 6.0 R2" - User-friendly interface - Easy updating of software and operating system - International setting configuration Multilanguage interface Date/time numbers formatting system Measurement systems (S.I.; US System) - Software modularity Reference standards and tests compiled through easy to install software modules - Power calculation Superior calculation capacity Graphic representation of the test data Independent use from the PC Software - Languages - Italian, English, French, German, Spanish, Russian, Polish, Greek, Portuguese, Dutch, Romanian, Czech, Additional languages on request Software - Licenses - Every machine has an unique specific serial number - Compliance to specific standards through dedicated license files Software - Record and report - Text records; Data, Results, Chart - Printing: Through on board printer (Accessory C127N) Through PCL printer connected to USB Software - "Maintenance" - Available updates; Operating system; Applications, licenses backup and restore; Configuration (backup and restore); Software log - New UTM2: machine control through Ethernet (Ethernet, internet) - Internet connection for remote assistance

#### Kelengkapan Produk

#### Spesifikasi Teknis Lainnya

Negara Asal Pembuatan Produk Amerika

#### Label Produk Ramah Lingkungan Hidup



Informasi KBLI

No.	Kategori ID	Nama Kategori
1.	G45100	PURBAKAWAN BESAR ATAS DASAR BALAS UKURAN KUNYAS
2.	G46301	PURBAKAWAN BESAR MANGROVE DAN MANGROVE PEROKOHAN, SIKAS, GADANG DAN PERUBAHAN PERUBAHAN
3.	G46500	PURBAKAWAN BESAR MARI, PERABAN DAN PERUBAHAN LAINNYA
4.	G46602	PURBAKAWAN BESAR MINERAL BAKHAKSI
5.	G46601	PURBAKAWAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA
6.	G49000	PURBAKAWAN BESAR BERBAGI MACAM BAHAN
7.	M71200	PURBAKAWAN TEKNOLOGI

Kontrak Penyedia

PT. MANUSA MANUSA PRAKAMA

Sejarah Pengiriman: Anulakabang • Produk • Kompany • Paket • Data Master • Profil • Log di Lintas • Berita • Menu • Unlup • Tempa Jarak • Pendaftaran

Data Sikap Penyedia

No.	izin usaha	No. Surat	Bertaku Sampai	Sumber Data	Instansi Persebit	Status Verifikasi	Dulumen	Verifikasi P/PPK	Rinyet Verifikasi
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	01633/UP/UR/2016/SPPT	9998-01-31 00-12-00-0	LNPP	BALAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU REMBELANTAN KOTA GEMILANG	Tidak Diverifikasi		<input type="checkbox"/>	1.000
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	037226- PERR/01/031/2021/PTSP	2021-10-31 00-00-00-0	LNPP	DINAS PENANJANG NEGARA DAN PELAYANAN KEPERLUAN PENTU KESEKRETARIATAN KANTORING	Tidak Diverifikasi		<input type="checkbox"/>	1.000
3	Nomor Induk Berusaha (NIB)	022500702001	9999-12-31 00-00-00-0	OSIS	Levanta OSS - BNIPI	Diverifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)	022500702007	9999-01-31 00-12-00-0	LNPP	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Tidak Diverifikasi		<input type="checkbox"/>	1.000
5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	022000702007	9999-01-31 00-12-00-0	LNPP	Lembaga OSS Penanaman Modal Indonesia	Tidak Diverifikasi		<input type="checkbox"/>	1.000
6	Nomor Induk Berusaha (NIB)	022000702007	9999-12-31 00-00-00-0	OSIS	Lembaga OSS - BNIPI	Diverifikasi		<input checked="" type="checkbox"/>	1.000

Status Defeat Hitam

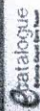
Nama Penyedia	NPNP	Status Blacklist	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	URL Insiproc	Verifikasi Oleh Sistem
PT. MANUSA MANUSA PRAKAMA	7048212018422060	Tidak Ada				





### Informasi KBLI

No.	Kategori ID	Nama Kategori
1.	G46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEI) ATAU KONTRAK
2.	G46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENCOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
3.	G46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
4.	G46642	PERDAGANGAN BESAR MINERAL, RADIOAKTIF
5.	G46691	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA
6.	G46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
7.	M71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI



PT. KANSA NAGA PRATAMA

Beranda | Pengumuman | Pro Katalog | Produk | Kompetisi | Paket | Data Master | Profil | Log Aktivitas | Berita | Money | Unduh | Tanya Jawab | Perancangan | Syarat dan Ketentuan | Hubungan Kami

### Data Sikap Penyedia

Izin Usaha | Pajak | Akta

No.	Nama	NPWP	Konfirmasi Status Wajib Pajak
1.	PT. KANSA NAGA PRATAMA	70824293842006	VALID

### Status Daftar Hitam

Nama Penyedia	NPWP	Status Blacklist	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	URL Inaproc	Verifikasi Oleh Sistem
PT. KANSA NAGA PRATAMA	70824293842006	Tidak Aktif				









Daftar Paket

Tampilkan 10 data

Nomor	Paket	Komoditas	Satuan Kerja	Instansi	Nama Penyedia	Tanggal Buat	Posisi	Jenis Paket	Negosiasi	Total Produk	Total Harga	Status	Lacak Status
1.	AL2-P2-403-8527077 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024	ppk	Purchasing	Ya	2	Rp 408.950.000,00	Proses negosiasi	
2.		Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024		Purchasing			Rp 0,00	Draft	
3.	AL2-P2-403-8526530 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	16 March 2024	ppk	Purchasing	Ya	2	Rp 410.250.000,00	Paket batal	
4.		Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	16 March 2024		Purchasing			Rp 0,00	Draft	
5.	AL2-P2-303-3246541 Pengadaan Alat Automatic Marshalf Compressor	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	06 March 2023	ppk	Purchasing	Ya	1	Rp 490.000.000,00	Paket selesai	

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 data





Beranda Beranda Paket Detail Paket Negosiasi

Rembali

Beranda Beranda Paket Detail Paket Negosiasi

Beranda Beranda Paket Detail Paket Negosiasi

Negosiasi Paket AL2-P2403-8827077

**eCatalogue** E-Catalogue Produk

Beranda Pengumuman Pro Katalog Produk Kompetisi Paket Data Master Profil Log Aktivitas Berita Monet Unduh Tanya Jawab Pelelangan

Syarat dan Ketentuan Hubungi Kami

Pemesan Setuju

Penyedia Setuju

Kursi IDR

Harga Kesepakatan

Perkiraan Ongkos Kirim

0.000

Harga Negosiasi

0.000

Harga Satuan

0.000

Mata Uang

IDR

Kuantitas

1

2

0

0

330.000.000

4.250.000

4.850.000

17/03/2024

17/03/2024

Alas lengkap term.

Longgop

330.000.000

6.500.000

Total Harga

Menampilkan 1 sampai 0 dan 0 data





Baranda Daftar Paket Detail Paket Negosiasi

Kembali

Selamat datang kembali di Katalog Produk. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon 021-25111111 atau email [info@ecatalogue.com](mailto:info@ecatalogue.com).

Berhasil mengirim negosiasi paket.

Negosiasi Paket AL2-P2403-8827077

ecatalogue

Etolase Produk

Account ID

Q

Chat Suci Anas

Baranda Pungutnyaman Pra Katalog Produk Kompetisi Paket Data Master Profil Log Aktivitas Berita Monev Unduh Tanya Jawab Pelanggaran Syarat dan Ketentuan Hubungi Kami

Pemesan Setuju

Penyedia Setuju

Kurs IDR

Harga Kesepakatan

Perkiraan Ongkos Kirim

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Negosiasi	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Harga Terbaik	Catatan Tambahan	Total Harga
4826201999-AL2-190508204 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	399.250.000	340.000.000	0	17/03/2024		Alat lengkap termx	340.000.000
4826201999-AL2-190846701 BIKORUS	2	IDR	4.850.000	4.450.000	0	17/03/2024		Lengkap	8.900.000

Merupakan 1 sampai 0 dan 0 data





[Beranda](#)
[Tanya Jawab](#)
[Pelanggaran](#)

0 Koneksi

Sembunyi

Berhasil melakukan negosiasi paket

**Negosiasi Paket AL2-P2403-8827077**

<b>Etalase Produk</b>	Alat Laboratorium	<b>Jumlah Produk yang Dipesan</b>	2
<b>No. Paket</b>	AL2-P2403-8827077	<b>Total Harga Produk</b>	Rp. 338.500.000,00
<b>Nama Paket</b>	Belanja Modal Alat Laboratorium Sahati Bangkawang Kertokus	<b>Kurs</b>	IDR
<b>Pemesan Setuju</b>			
<b>Penyedia Setuju</b>			

**Harga Kesepakatan**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Negosiasi	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	Total Harga
482831998-AL2-180808208 LOAD FRAME FOR MARIO'S ALL STABILITY	1	IDR	399.250.000	1.300.000.000	0	17/03/2024	Alat lengkap term	330.000.000
482831998-AL2-180808207 SKRUPUS	2	IDR	4.850.000	4.250.000	0	17/03/2024	Lengkap	8.500.000

Menampilkan 1 sampai 0 dari 0 data





Beranda Pengumuman Pra Katalog Produk Kompiers Paket Data Master Profil Log Aktivitas Berita Monev Unduh Tanya Jawab Pelanggaran Syarat dan ketentuan Hubungi Kami

Beranda Daftar Paket Detail Paket **Negosiasi**

Kembali

Sertifikat Produk dan Berhasil menginisiasi dan berhasil menginisiasi Rep. Arsitek Kepala LKIP Nomor 12.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kepala Dinas/Dik

Berhasil mengirim negosiasi paket

**Negosiasi Paket AL2-P2403-8827077**

<b>Estimasi Produk</b>	Alat Laboratorium	<b>Jumlah Produk yang Dipesan</b>	2
<b>No. Paket</b>	AL2-P2403-8827077	<b>Total Harga Produk</b>	Rp 348.900.000,00
<b>Nama Paket</b>	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	<b>Kurs</b>	IDR

**Pemesan Setuju**

**Penyedia Setuju**

**Harga Kesepakatan**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Negosiasi	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Harga Terbaik	Catatan Tambahan	Total Harga
4826201899-AL2-1905045701 BROKING	2	IDR	4.650.000	4.450.000	0	17/03/2024		Lengkap	8.900.000

Merampikan 1 sampai 0 dari 0 data





Detail Produk	Daftar Isi Produk	Perkiraan & Link	Sumber Bank	Detail
ID Paket	400.000.000.000			
Jenis Paket	400.000.000.000			
ID BOP	400.000.000.000			
Produk Utama	400.000.000.000			
Nama Paket	400.000.000.000			
Paket Lainnya	400.000.000.000			
Instansi	400.000.000.000			
Sarana Kerja	400.000.000.000			
Unit Layanan Kerja	400.000.000.000			
Alamat Distribusi	400.000.000.000			

Detail Produk	Daftar Isi Produk	Perkiraan & Link	Sumber Bank	Detail
ID Paket	400.000.000.000			
Jenis Paket	400.000.000.000			
ID BOP	400.000.000.000			
Produk Utama	400.000.000.000			
Nama Paket	400.000.000.000			
Paket Lainnya	400.000.000.000			
Instansi	400.000.000.000			
Sarana Kerja	400.000.000.000			
Unit Layanan Kerja	400.000.000.000			
Alamat Distribusi	400.000.000.000			

Detail Produk	Daftar Isi Produk	Perkiraan & Link	Sumber Bank	Detail
ID Paket	400.000.000.000			
Jenis Paket	400.000.000.000			
ID BOP	400.000.000.000			
Produk Utama	400.000.000.000			
Nama Paket	400.000.000.000			
Paket Lainnya	400.000.000.000			
Instansi	400.000.000.000			
Sarana Kerja	400.000.000.000			
Unit Layanan Kerja	400.000.000.000			
Alamat Distribusi	400.000.000.000			

Detail Produk	Daftar Isi Produk	Perkiraan & Link	Sumber Bank	Detail
ID Paket	400.000.000.000			
Jenis Paket	400.000.000.000			
ID BOP	400.000.000.000			
Produk Utama	400.000.000.000			
Nama Paket	400.000.000.000			
Paket Lainnya	400.000.000.000			
Instansi	400.000.000.000			
Sarana Kerja	400.000.000.000			
Unit Layanan Kerja	400.000.000.000			
Alamat Distribusi	400.000.000.000			







[Beranda](#) [Bantuan](#) [Fitur](#) [Kategori](#) [Produk](#) [Kategori](#) [Paket](#) [Data Master](#) [Profil](#) [Log Aktivitas](#) [Bantuan](#) [Membaca](#) [Unduh](#) [Tanya Jawab](#) [Pengaturan](#)

Syarat dan Ketentuan [Hubungi Kami](#)

Beranda [Daftar Paket](#) [Jumlah Paket](#) [Negosiasi](#)

0 Kertas

Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan negosiasi.

Kesuksesan dalam negosiasi tergantung dari beberapa faktor.

**Negosiasi Paket AL2-P2403-8827077**

<b>Etlase Produk</b>	Alat Laboratorium	<b>Jumlah Produk yang Dipesan</b>	1
<b>No. Paket</b>	AL2-P2403-8827077	<b>Total Harga Produk</b>	Rp. 850.000.000.000
<b>Nama Paket</b>	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Biologi Komplit	<b>Kurs</b>	10000
<b>Pemesan Setuju</b>			
<b>Penyedia Setuju</b>			

**Harga Kesepakatan**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Negosiasi	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Marga Terbaik	Catatan Tambahan	Total Harga
48261899-AL2-190806204 LOAN FINANCE FOR MANGSAL STABILITY	1	IDR	399.250.000	378.000.000	0	29-08-2024		Alat lengkap serta	378.000.000
48261899-AL2-190806204 SEKORUS	2	IDR	4.850.000	4.450.000	0	29-08-2024		Lengkap	9.900.000

Menampilkan 1 sampai 0 dari 0 data









**Kembali**

Kedua bidai pihak telah menyepakati negosiasi

**Negosiasi Paket AL2-P2403-8827077**

<b>Etalase Produk</b>	Alat Laboratorium	<b>Jumlah Produk yang Dipesan</b>	2
<b>No. Paket</b>	AL2-P2403-8827077	<b>Total Harga Produk</b>	Rp. 385.900.000,00
<b>Nama Paket</b>	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan konstruksi	<b>Kurs</b>	IDR
<b>Pemesan Setuju</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Penyedia Setuju</b>	<input type="checkbox"/>		

**Harga Kesepakatan**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Negosiasi	Perkiraan Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Harga Terbaik	Catatan Tambahan	Total Harga
4820301999-AL2-190508304 LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	398.250.000	378.000.000	0	29/08/2024		Alat lengkap termk	378.000.000
4820301999-AL2-190846701 BROCAUS	2	IDR	4.850.000	4.450.000	0	29/08/2024		Lengkap	8.900.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 data









Syarat dan Ketentuan | [Hubungi Kami](#)

**Daftar Paket**

Tampilkan 5 dari 5 data

Nomor	Paket	Komoditas	Satuan Kerja	Instansi	Nama Penyedia	Tanggal Buat	Posisi	Jenis Paket	Negosiasi	Total Produk	Total Harga	Status	Lacak Status
1.	<b>AL2-P2403-8827077</b> Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Pengambilan Karsinogenik	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024	penyedia	Purchasing	Ya	2	Rp 386.900.000,00	Persetujuan penyedia	
2.		Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024		Purchasing			Rp 0,00	Draft	
3.	<b>AL2-P2403-8826930</b> Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Pengambilan Karsinogenik	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	16 March 2024	ppk	Purchasing	Ya	2	Rp 410.250.000,00	Paket batal	
4.		Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	16 March 2024		Purchasing			Rp 0,00	Draft	
5.	<b>AL2-P2303-3246541</b> Pengadaan Alat Autopsi Marshall Compactor	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	06 March 2023	ppk	Purchasing	Ya	1	Rp 490.000.000,00	Paket selesai	

Tampilkan 1 sampai 5 dari 5 data













Berhasil mengirim kontrak

Kembali

No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Deskripsi	File	Aksi
07/Kontrak-ekatalog/UPTD-LBK/III/2024	18 March 2024	Rp 386.900.000,00	Kontrak Pengadaan Barang Alat Marshall Stability dan Biconus	Surat Pesanan Kontrak ALBBK 2024.pdf	Aksi

Dokumen Tambahan

Tambah Dokumen Kontrak

No. Kontrak

Tanggal Kontrak

Nilai Kontrak

Deskripsi

File

Aksi

No data found



Beranda Pengumuman Pra Katalog Produk Kompetisi Paket Data Master Profil Log Aktivitas Berita Monev Unduh Tanya Jawab Pelanggaran Syarat dan Ketentuan Hubungi Kami

### Daftar Paket

Tampilkan BPMN

Nomor	Paket	Komoditas	Satuan Kerja	Instansi	Nama Penyedia	Tanggal Buat	Posisi	Jenis Paket	Negosiasi	Total Produk	Total Harga	Status	Lacak Status
1.	AL2-P2403-8827077 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024	distributor	Purchasing	Ya	2	Rp 386.900.000,00	Melakukan pengiriman dan penerimaan	
2.	AL2-P2403-8826930 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	PT. KHANSA NIAGA PRATAMA	16 March 2024		Purchasing			Rp 0,00	Draft	
3.	AL2-P2403-8826930 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	16 March 2024	ppk	Purchasing	Ya	2	Rp 410.250.000,00	Paket batal	
4.	AL2-P2403-8826930 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Alat Laboratorium	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Provinsi Sumatera Barat	INDOTEST MULTI LABORATAMA	16 March 2024		Purchasing			Rp 0,00	Draft	



### Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : AL2-P2403-8827077  
Nama Paket : Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

#### 1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 16 Maret 2024  
Total Harga Paket : Rp 408.950.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	
LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	Rp 399.250.000,00	Rp 0,00		Rp 399.250.000,00
BIKONUS	2	IDR	Rp 4.850.000,00	Rp 0,00		Rp 9.700.000,00



**2. Rev. 1**

Tanggal Revisi : 17 Maret 2024  
Total Harga Paket : Rp 338.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
BIKONUS	2	IDR	Rp 4.250.000,00	Rp 0,00	17 Maret 2024	Lengkap Rp 8.500.000,00	
LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	Rp 330.000.000,00	Rp 0,00	17 Maret 2024	Alat lengkap termasuk PPN, PPH, Garansi 1 Tahun, Packing, Biaya Pengiriman, Instalasi, Pelatihan 2 hari Rp 330.000.000,00	

**3. Rev. 2**

Tanggal Revisi : 17 Maret 2024  
Total Harga Paket : Rp 387.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
BIKONUS	2	IDR	Rp 4.500.000,00	Rp 0,00	17 Maret 2024	Lengkap Rp 9.000.000,00	

Ini merupakan informasi riwayar negosiasi paket, bukan surat.



Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	
LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	Rp 378.500.000,00	Rp 0,00	17 Maret 2024	Rp 378.500.000,00
						Alat lengkap termasuk PPN, PPH, Garansi 1 Tahun, Packing, Biaya Pengiriman, Instalasi, Pelatihan 2 hari

**4. Rev. 3**

Tanggal Revisi : 17 Maret 2024

Total Harga Paket : Rp 348.900.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	
BIKONUS	2	IDR	Rp 4.450.000,00	Rp 0,00	17 Maret 2024	Rp 8.900.000,00
LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	Rp 340.000.000,00	Rp 0,00	17 Maret 2024	Rp 340.000.000,00
						Alat lengkap termasuk PPN, PPH, Garansi 1 Tahun, Packing, Biaya Pengiriman, Instalasi, Pelatihan 2 hari

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



5. Rev. 4

Tanggal Revisi : 18 Maret 2024

Total Harga Paket : Rp 386.900.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	
BIKONUS	2	IDR	Rp 4.450.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2024	Rp 8.900.000,00
LOAD FRAME FOR MARSHALL STABILITY	1	IDR	Rp 378.000.000,00	Rp 0,00	29 Agustus 2024	Rp 378.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



**DOKUMEN KUALIFIKASI PERUSAHAAN**



**NURHAYATI SAMPERURA, S.H.**

**S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia. Nomor : C-466.HH.03.01-Th.2001**

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

TANGGAL

21 JUNI 2014

NOMOR

103

Kantor :

Jl. Sumber Melati No. 2 Kav. 1-1  
Komp. Sumber Sari, Bandung - 40222

Telp. (022) 2511111 / 2511112 / 2511113 / 2511114 / 2511115 / 2511116 / 2511117 / 2511118 / 2511119 / 2511120

WWW.KEMKORPRIKUMHAM.go.id



PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

NOMOR : 103.

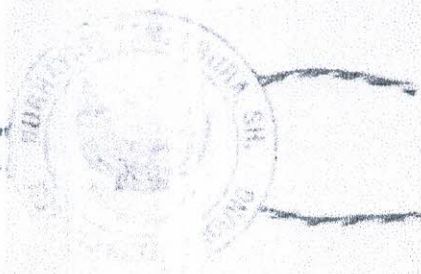
Pada hari ini, tanggal dua puluh sembilan bulan satu tahun  
satu ribu empat puluh lima di Bandung, Jawa Barat, telah  
berada para pendiri sebagai berikut:

Menghadap kepada saya, **NURHAYATI SAMPERURA, Sarjana  
Hukum**, di tempat sebagai Notaris Kota Bandung, dengan  
sindikat dan saksi-saksi yang saya, Notaris kota dan  
saya disebarkan pada akhir kata-kata: -----

1. **Tuan RIZKIE RAMADHAN SETLAWAN**, lahir di Bandung, pada  
tanggal satu Maret tahun seribu sembilan ratus  
satu puluh empat di Bandung, Jawa Barat  
Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota  
Bandung, Jalan Melati Blok B-10, Kelurahan Kertadiponegoro  
No. 5, Kecamatan Setengah Belu, Kecamatan Kertadiponegoro  
Kabupaten Bandung Selatan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia  
Kependudukan No. 31.11.1941.001.

2. **Nyonya PATRIA CITRA UTAMI**, lahir di Bandung, pada  
tanggal satu Maret tahun seribu sembilan ratus  
satu puluh empat di Bandung, Jawa Barat  
Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota  
Bandung, Jalan Melati Blok B-10, Kelurahan Kertadiponegoro  
No. 5, Kecamatan Setengah Belu, Kecamatan Kertadiponegoro  
Kabupaten Bandung Selatan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia  
Kependudukan No. 31.11.1941.002.

Pada penandatanganan ini saya, Notaris, -----  
saya penandatanganan telah dibuat seperti terdapat di atas  
tersebut, bahwa kedua para penandatangan ini dari  
pilih para penandatangan telah mendapat izin sebagai berikut -----

















teknologi, desain, konstruksi, perawatan, selain, ---  
perawatan, pemeliharaan, pemeliharaan, perbaikan, pemeliharaan  
khusus, termasuk meliputi kegiatan pemasangan tiang  
pencangkupan, komputer beton pracetak, material dan  
kegiatan lain dan kegiatan usaha berikut serta  
pemasangan peralatan instalasi;

1. menjalankan usaha dalam bidang percetakan yang

meliputi pembudayaan dasar-dasar, penerbitan buku-  
buku dan majalah, penulisan, desain, dan cetak  
grafis;

2. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum

di darat baik untuk pengangkutan orang penumpang  
maupun untuk pengangkutan barang, pengangkutan  
malik perantara termasuk ekspedisi dan pergudangan.

#### MODAL

#### Pasal 4

1. Modal dasar perusahaan berjumlah Rp 500.000.000, ---

(lima ratus juta rupiah) terdiri atas 5.000

(lima ribu) lembar saham, masing-masing saham ---

perusahaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). -

2. Dari modal dasar tersebut, separuh ditempatkan dan

disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah ---

Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) -

oleh para pendiri yang telah mencairkan

saham dan ribuan serta kelas nominal saham yang ---

disebutkan pada ayat ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan

oleh perusahaan menurut keperluan modal, kebutuhan, ---

dan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, ---

para pemegang saham yang namanya tercantum dalam daftar







- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
 dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham, harus -----  
 ditandatangani oleh Direksi perusahaan yang diwakili  
 oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya dengan  
 persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota -----  
 komisaris lainnya. -----

**PENGGANTIAN SURAT SAHAM**

**Pasal 6**

- 1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai -----  
 lagi, maka atas permintaan mereka yang -----  
 berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----  
 saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau  
 tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali  
 kepada Direksi. -----
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat di -----  
 harus dimusnahkan dan diberitahu secara lisan  
 Direksi untuk disebarikan dalam rapat Umum -----  
 Pemegang Saham berikutnya. -----
- 3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan -----  
 dari mereka yang berkepentingan, Direksi -----



- mengemukakan surat saham pengganti, setelah  
 menurut pendapat Direksi Kefitangan itu cukup  
 dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu  
 oleh Direksi untuk tiap-tiap pemegang yang khusus;
4. Setelah suatu surat pengganti dikeluarkan, surat sah  
 yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi  
 terhadap perusahaan;
  5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran  
 surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham  
 yang bersangkutan;
  6. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),  
 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis  
 mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif sah  
 pengganti.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SARAH**

**Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan atas  
 pemindahan hak yang dibuktikan oleh salah satu  
 pemegang saham yang mempunyai pemindahan atas saham  
 yang sah;
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas  
 sahamnya harus menandatangani surat pernyataan  
 pemegang saham lain dengan menyetujui harga serta  
 persyaratan penjualan dan menyetujui kepada siapa  
 saham tersebut hendak dipindahkan tersebut;
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan  
 dari instansi yang berwenang, jika diperlukan  
 berdasarkan undang-undang yang berlaku;
4. Mulai hari pengalihan hak atas saham pemegang saham  
 yang bersangkutan harus melaksanakan hak atas saham



sebagai badan hukum yang didirikan di Indonesia  
diperseorotkan

3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab  
sebab lain orang asing telah menjadi milik warga  
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka  
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak orang atau badan  
hukum tersebut wajib melaksanakan hak atas sahamnya  
kepada warga negara Indonesia atau badan hukum  
Indonesia, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 8**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut  
RUPS adalah :
  - a. RUPS tahunan.
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut  
juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti  
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,  
kecuali dengan cara ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - Laporan tahunan yang telah diperiksa oleh Dewan  
Komisaris atau mendapat persetujuan RUPS;
    - Laporan keuangan yang mendapat persetujuan rapat
  - b. Ditetapkan pembagian laba, jika perusahaan  
mendapatkan laba pada tahun tersebut;
  - c. Dapat diangkat masa jabatan baru yang telah diajukan  
sebelumnya sesuai dengan memperhatikan  
ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan







tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS  
dipimpin oleh seorang direktur yang ditunjuk oleh  
direktur lama atau Wakil Direktur Utama; -----

7. Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan atau  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah  
seorang anggota Dewan Komisaris; -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh  
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang  
hadir dalam rapat; -----

#### KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

##### Fasal 10

1. RUPS dapat dilaksanakan apabila kuorum kehadiran  
sedagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang  
Perusahaan Terbuka telah dipenuhi; -----

2. Pelaksanaan kuasa mengenai diri orang dilakukan dengan  
surat bertulis yang tidak ditandatangani dan menandai  
hal lain, secara lisan, secara elektronik atau dengan  
cara lain yang sah dan diketahui oleh pemegang saham  
yang hadir dan RUPS; -----

3. Setiap pemegang saham yang tidak hadir dan dianggap tidak  
ada dan tidak dibenarkan untuk menentukan jumlah suara  
yang dikerahkan dalam RUPS; -----

4. RUPS dapat menjangkit keputusan berdasarkan musyawarah  
untuk mutakat atau berdasarkan suara setuju dari  
jumlah suara yang dikerahkan dalam RUPS sebagaimana  
ditentukan dalam undang-undang; -----







c. Menanggung hutang;

d. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta segala hal di luar segala kegiatan, menandatangani perjanjian dengan pihak lain dan pihak lain dengan perjanjian, serta menjalankan segala tindakan, baik yang menyangkut kepentingan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

berus dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Perbuatan berikut untuk :

- Mengalihkan;
- melepaskan, baik atas menjadi jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan, dalam bentuk buku baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dimiliki perseroan maupun berkualifikasi yang harus ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk



dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;

2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah

seorang anggota Direksi lainnya berhak dan

berwajiban bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili perseroan.

### RAPAT DIREKSI

#### Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota dewan komisaris atau

c. atas permintaan tertulis dari suatu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili

10% (sepuluh per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar ini

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan syarat yang disyaratkan

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak mempergunakan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat ini berlaku untuk seluruh anggota Direksi, kecuali untuk anggota rapat.

5. Rapat Direksi diadakan selanjutnya selanjutnya











... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

**Pasal 15**

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...

... yang ...



sebagai anggota dan lain-lain serta berhak untuk  
mendapatkan segala tindakan yang telah ditetapkan oleh  
Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk  
memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris yang  
didatangkan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Dewan Direksi dipanggil dan  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai sekurang-kurangnya  
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris  
dibentukkan untuk mengurus perusahaan.  
Dalam hal dibentuk Dewan Komisaris sebagai  
sementara, kekuasaan sementara kepada anggota  
lain di antara anggota Dewan Komisaris atau  
tanggungjawab Dewan Komisaris.

4. Dalam hal semua atau beberapa anggota Dewan Komisaris,  
sebagai tugas dan wewenang yang harus dilakukan kepada  
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris atau  
Anggaran Besar dan berlaku pada dasarnya.

**RAPAT DEWAN KOMISARIS**

**Pasal 16**

Keputusan dan tindakan Dewan Komisaris yang  
matters dan berlaku pada rapat Dewan Komisaris.

**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

**Pasal 17**

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat  
anggaran tahunan dan laporan kepada Dewan Komisaris  
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja ditetapkan berdasarkan pada hal-hal  
diungkapkan dalam Laporan 30 Disepuluh dan rencana  
tahunnya harus dilaksanakan pada tahun.





















**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-16072.40.10 2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT KHANSA NIAGA PRATAMA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Pendaftaran Notaris NURHAYATI SAMPERURA, SH selaku Akta Nomor 103 tanggal 21 Juni 2014 tentang Pendirian Badan Hukum PT KHANSA NIAGA PRATAMA tanggal 1 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran A014070133100066 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KHANSA NIAGA PRATAMA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESALU** Mengesahkan pendirian badan hukum PT KHANSA NIAGA PRATAMA yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Akta Notaris No 103 tanggal 21 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris NURHAYATI SAMPERURA, SH yang berkedudukan di KOTA BANDUNG;
  - KEBUA** Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA;
  - KETIGA** Jenis Perseroan UMUM;
  - KEEMPAT** Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir;
  - KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2014

WAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



*(Signature)*  
**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066696.40.80.2014 TANGGAL 04 Juli 2014





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-16072.40.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT KHANSA NIAGA PRATAMA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Modal Dasar: Rp. 500.000.000,00
2. Modal Ditempatkan: Rp. 125.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham: Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN	DIREKTUR		250	Rp. 25.000.000
PATRIA SYRA UTAMI	KOMISARIS		500	Rp. 50.000.000

Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 04 Juli 2014



Dirjen MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0066696.40.80.2014 TANGGAL 04 Juli 2014



# Notaris

**LINA AGUSTINAWATI, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-0396.AH.02.01.Th.2010

TANGGAL 28 Januari 2010

Taman Kopo Indah II Blok 3F Nomor 6

Kabupaten Bandung

Telp. (022) 5402599

email : notarislinaagustinawati@yahoo.co.id.

---

## SALINAN

---

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN

TERBATAS PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

Tanggal : 17 FEBRUARI 2020

Nomor : - 09 -



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS P T KHANSA NIAGA PRATAMA

Nomor : .....

Pada hari ini, Senin, .....  
LAKUKAN GUARDIANSHIP (TANGGUNG JAWAB) atas perusahaan terbatas  
Waktu Indonesia Bagian Barat.  
Berhadapan dengan nama, LINA AGUSTINAWATI, Sarjana Hukum,  
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, .....  
Kebupaten Bandung, tempat tinggal .....  
nama samanya akan dipertanggung jawabkan pada saat .....  
Untuk keperluan ini, atas pertanggung jawaban perusahaan pada  
saat ini berada di Kota Bandung, .....

Tuan RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN, Laki-laki Bandung, pada

tanggal 11-09-1974 .....  
petilakaris sampul anggur, Pelajar Matematika,  
bertempat tinggal di Jalan Mekarjaya Kencana No. 10,  
Residence A-8, Jalan Telega 107, Jalan Raya 119,  
Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Selatan, Kota  
Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pasang Nomor Telp.  
Bandung dengan nomor tidak resmi nomor  
021-2510944/1011. Bertempat tinggal di .....  
Desember tahun .....  
Indonesia; .....

Menurut keterangannya dapat ini ini .....  
berdasarkan atas keadaan yang .....  
Rapat dan berhadapan dengan .....  
[RUPSB] dari perseroan yang akan disebut sebagai







Berita dari Rapat tersebut telah dibaca dan disetujui  
Jum Penetapan dalam Rapat Rata-rata Pemerintah Daerah  
KABUPATEN NIASA PROVINSI SUMATERA UTARA tanggal 13-12-2017  
Fungsi dan tugas sebagai berikut:

Berita dalam rapat tersebut telah disetujui sebagai  
1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar sebagai  
pasal 7b ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017  
Rapat tersebut adalah sebagai berikut: dan telah  
menyampaikan keputusan-keputusan yang telah disetujui  
terhadap segala hal yang ditanyakan dalam rapat.

Berita kepada pengantar Tuan RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN,  
tersebut Perisikapan Bupati tersebut diatas,  
telah diberi kelas untuk mendapat izin. Keputusan  
Rapat tersebut akan ditukar oleh Notaris, hal yang  
akan dinyatakan sekarang dengan akta ini.

Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, pengantar  
turut bertindak dalam kesesuaiannya seperti tersebut diatas  
dengan ini menerangkan dan menyatakan:

Berita sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 tersebut  
didasar, rapat telah diadakan keputusan dengan agenda  
bukan, Menyetujui dan menyetujui kembali Menyetujui  
pasa Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017  
Peraturan dan Keputusan Pasal 1 tentang Undang-Undang  
Tugas sesuai Peraturan. Hal yang dapat dilakukan  
tahun 2017 sebagai tugas-tugas. Adapun Cara  
Peraturan sehingga seluruh yang menjadi sebagai berikut:  
Non-berhenti dan Mendingkat kembali Menyetujui











tanggal tersebut ini. Untuk selanjutnya ini dapat disebut sebagai...

1. Nyonya RENI DAMAYANTI, lahir di ... pada tanggal ...

01-1955 empat Maret ...  
Kedua-duanya pegawai kantor ... dan ...  
Indonesia. Setelah saya, notaris, menandatangani ...  
penanggung dan para saksi tersebut, maka saya juga  
penanggung, para saksi dan saya, notaris, menandatangani  
akta ini.

2. Nyonya NOVITA WANDASARI, lahir di ... pada tanggal ...

10-11-1950 ...  
semolleratle semolleratle, bertempat tinggal di  
Perumahan Blok. M-11 Nomor ... Blok ...  
Kecamatan ... Kabupaten ...

Kedua-duanya pegawai kantor ... dan ...  
Indonesia.

Setelah saya, notaris, menandatangani ...  
penanggung dan para saksi tersebut, maka saya juga  
penanggung, para saksi dan saya, notaris, menandatangani  
akta ini.

Dibuat dengan tangan koretan lilas, tanpa tambahan, dan  
tangan koretan dengan ...

Mahuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN.

Notaris di Kabupaten ...







**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor AHU-AH.01.03-0092353  
Lampiran  
Perihal: Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT KHANSA NIAGA PRATAMA**

Kepada Yth.  
Notaris LINA AGUSTINAWATI, SH., M.HUM., M.KN  
TAMAN KOPO INDAH II, BLOK 3F, NO.6  
KABUPATEN BANDUNG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris LINA AGUSTINAWATI, SH., M.HUM., M.KN, berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG, mengenai perubahan Perjanjokatan Kembali, **PT KHANSA NIAGA PRATAMA**, berkedudukan di KOTA BANDUNG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Februari 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032853.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 18 Februari 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014045.AH.01.02.TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT KHANSA NIAGA PRATAMA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LINA AGUSTINAWATI, SH., M.HUM., M.KN sesuai salinan akta nomor 09 Tanggal 17 Februari 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT KHANSA NIAGA PRATAMA tanggal 18 Februari 2020 dengan Nomor Pendaftaran: 4020021832242263 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT KHANSA NIAGA PRATAMA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT KHANSA NIAGA PRATAMA - dengan NPWP 708242938422000 yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 09 Tanggal 17 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris LINA AGUSTINAWATI, SH., M.HUM., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Februari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032853.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 18 Februari 2020





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014045.AH.01.02.TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT KHANSA NIAGA PRATAMA

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 125.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN	DIREKTUR		750	Rp. 75.000.000
PATRIA CITRA UTAMI	KOMISARIS		500	Rp. 50.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LULUH




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Februari 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032853.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 18 Februari 2020

Keputusan Menteri dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)  
Notaris Kabupaten Bandung

  
LINA AGUSTINAWATI, S.H., M.Hum., M.Kn.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN : Bendung Kulon  
KELURAHAN : Cijerah

No. 00390

Model XVI.

**SURAT KETERANGAN DOMICILI PERUSAHAAN**

Nomor : 14 / DP / VIII / 2014

Lurah Cijerah bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN

No. KTP : 3273350103940001

Tempat & Tanggal lahir (umur) : Bendung, 01 Maret 1994

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat rumah & Tilpon : Jl. Melong Asih Komp. Nirwana Residence 4 - 6

Jabatan : Direktur

Benar mempunyai perusahaan yang berdomicili dalam wilayah Kelurahan Cijerah Kecamatan Bendung Kulon Kota Bandung dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

Alamat Kantor : Jl. Melong Asih No. 66 Komp. Nirwana Residence 4 - 5

Tilpon Kantor : .....

Akte Pendirian : Notaris Murhyati Sempurno, SH  
No. 103 tanggal 21 Juni 2014  
Perdagangan Umum dan Jasa

Bergerak dalam bidang : .....

Jumlah pegawai : 2 ( dua ) Orang

Jam kerja : 08.00 - 17.00

Surat Keterangan ini dikeluarkan kepada yang bersangkutan untuk keperluan pengurusan Izin Tempat Usaha.

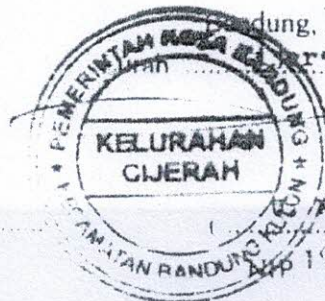
Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Tanggal .....

Nomor .....

Bandung, 06 Agustus 2014

Mengetahui :



MUCHTAR, MK, SE

Camat .....

KIP 19590529 198604 1 001





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220007202807**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	PT KHANSA NIAGA PRATAMA
2. Alamat Kantor	Komplek Melong Nirwana Residence Kav. A5, Jalan Melong Asih No.66, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40213
No. Telepon	02286067632
Email	khanita_pi@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertanggungjawaban Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 20 Februari 2020

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dipetak tanggal 16 September 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220007202807

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46930	Percagangan Besar Berdaga Macam Barang	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40225	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha	Percagangan Mesin Percagangan Mesin	SJPH d fasilitas BPJPH SJPH d fasilitas BPJPH

SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Hak

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46899	Percagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40225	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46899	Percagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40225	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46891	Percagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: -	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46100	Percagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: -	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46893	Percagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40225	Rendah	NIB	Untuk persiapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.



3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIS tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Informasi (BPSI).





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220007202807

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT KHANSA NIAGA PRATAMA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Komplek Melong Nirwana Residence Kav. A5, Jalan Melong Asih No.66, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat
NFWP	: 70.824.293.8-422.000
Nomor Telepon	: 02286067632
Nomor Fax	: 022-86067632
Email	: khanita_pt@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 20 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**0220007202807**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
2	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
3	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
4	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
5	46699	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL
6	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
7	71205	JASA KALIBRASI/METROLOGI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA  
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha : PT KHANSA NIAGA PRATAMA  
Nomor Induk Berusaha : 0220007202807  
Alamat Kantor / Korespondensi : Komplek Melong Nirwana Residence Kav. A5, Jalan Melong Asih No.66, Kel. Cijerah, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 Februari 2020







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT KHANSA NIAGA PRATAMA  
Nomor Induk Berusaha : 0220007202807

No.	Pejabat Berwenang	Kode/ Nama KBLJ	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
2	Walikota Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	46699 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL.	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
3	Walikota Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	46693 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Walikota Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
5	Walikota Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
6	Walikota Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Komplek Melong Nirwana Residence Kavling A5 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 Februari 2020





PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BANDUNG

NIK : 3273150103940001

Nama : RIZKIE RAMADHAN SETIAWAN  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 01-03-1994  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : JL. MELONG ASIH KOMP. NIRWANA  
RESIDENCE A 6  
RT/RW : 007 / 009  
Kel/Desa : CIJERAH  
Kecamatan : BANDUNG KULON  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 01-03-2018



KOTA BANDUNG  
17 2013

*[Handwritten signature]*

KTP DIREKTUR

PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BANDUNG

NIK : 3273154104870014

Nama : PATRIA CITRA UTAMI  
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 01-04-1987  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B  
Alamat : JL. MELONG ASIH KOMP.  
NIRWANA RESIDENCE A-05  
RT/RW : 007 / 009  
Kel/Desa : CIJERAH  
Kecamatan : BANDUNG KULON  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 01-04-2017



KOTA BANDUNG  
07 12 2012

*[Handwritten signature]*

KTP KOMISARIS





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 70.824.293.8-422.000  
PT. KHANSA NIAGA PRATAMA

JL MELONG ASIH KOMP MELONG NIRWANA RESIDENCE  
NO. A-5 RT. 007 RW. 009  
KEL. CIJERAH KEC. BANDUNG KULON  
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLGA





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT  
 KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLECA

Jl. Sekeloa No. 101, Bandung  
 Telp. (022) 2501000, 2501001, 2501002, 2501003, 2501004, 2501005, 2501006, 2501007, 2501008, 2501009, 2501010, 2501011, 2501012, 2501013, 2501014, 2501015, 2501016, 2501017, 2501018, 2501019, 2501020, 2501021, 2501022, 2501023, 2501024, 2501025, 2501026, 2501027, 2501028, 2501029, 2501030, 2501031, 2501032, 2501033, 2501034, 2501035, 2501036, 2501037, 2501038, 2501039, 2501040, 2501041, 2501042, 2501043, 2501044, 2501045, 2501046, 2501047, 2501048, 2501049, 2501050, 2501051, 2501052, 2501053, 2501054, 2501055, 2501056, 2501057, 2501058, 2501059, 2501060, 2501061, 2501062, 2501063, 2501064, 2501065, 2501066, 2501067, 2501068, 2501069, 2501070, 2501071, 2501072, 2501073, 2501074, 2501075, 2501076, 2501077, 2501078, 2501079, 2501080, 2501081, 2501082, 2501083, 2501084, 2501085, 2501086, 2501087, 2501088, 2501089, 2501090, 2501091, 2501092, 2501093, 2501094, 2501095, 2501096, 2501097, 2501098, 2501099, 2501100

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
 Nomor : 4881/KT/KP.109/KP.0503/2014

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diberitahakan bahwa

- |   |   |
|---|---|
| 1. NAMA                                   | PT. KHANSA NIAGA PRATAMA  |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)         | 790242006420000   |
| 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)         |   |
| 4. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama | 4720- PERDAGANGAN EDERAN KEMERAKAAN FARMASI DAN KESEHATAN   |
| 5. Alamat                                 | JL MELONG ASH ROMP MELONG NIHWANA RESIDENCE NO A-B RT 007 RW 009 KEMAJERAN KEC BANDUNG HILON KOTA BANDUNG, JAWA BARAT |
| 6. Tanggal                                | BANDUNG   |
| 7. Tanggal Mulai Terdaftar                | 20 AGUSTUS 2014   |
| 8. Kewajiban Pajak                        |   |

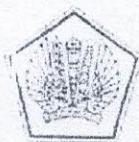
PPN Diturunkan	PPN ditanggung oleh Pemungutan PPN
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25 DPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 22
	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
PPN	
<input checked="" type="checkbox"/> Pemungutan PPN	
<input checked="" type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 20 Agustus 2014

Bandung, 20 Agustus 2014  
 a.n. Kepala Kantor  
 Kepala Seksi Pelayanan

R. L. MAYANI  
 NIP. 197010181995032002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

JL. SOEKARNO HATTA 216 BANDUNG  
TELEPON 022-8030568, 5005671 FAKSIMILE 022-8012575, S TJS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 021-500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
Nomor: S-96PKP/WPJ.09/KP.0503/2014

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

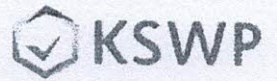
1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 70.824.293.8-422.000
2. Nama : PT. KHANSA NIAGA PRATAMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 47726 - Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan
4. Alamat : JL MELONG ASIH KOMP MELONG NIRWANA  
RESIDENCE NO.A-5 RT.007 RW.009  
KEL. CIJERAH KEC. BANDUNG KULON  
KOTA BANDUNG JAWA BARAT -
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak :  PPN  PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 28 November 2014

Bandung, 28 November 2014  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan.

Ita Damayanti  
NIP 197010181995032002



**Petunjuk Pengisian**

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 3 2022) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25 sesuai PMK 3 Tahun 2022
- Modul SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 3 2022) digunakan untuk permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor sesuai PMK 3 Tahun 2022

**PROFIL WAJIB PAJAK**

NPWP

708242938422000

NAMA WP

KHANSA NIAGA PRATAMA

ALAMAT

JALAN MELONG ASIH KOMPLEK MELONG NIRWANA RESIDENCE - KOTA BANDUNG

**PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA**

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SP 1 Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	



Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : KHANSA NIAGA PRATAMA

NPWP : 708242938422000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : Rp. 5.894.610,00

Tanggal Penyampaian : 21/03/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 25938306502240721810

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : PT KHANSA NIAGA PRATAMA

NPWP : 708242938422000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 12/12

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 11.797.251

Tanggal Penyampaian : 23/01/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 42938106078247234313

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : PT KHANSA NIAGA PRATAMA

NPWP : 708242938422000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 1/1

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 13.333.071

Tanggal Penyampaian : 24/02/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 44938206015247245413

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



